

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Mentawai bukan sekedar tujuan wisata dengan pantai yang cantik, ombak yang menantang, dan hutan tropis dengan rumah-rumah tradisional. Di balik citra itu, gugusan pulau ini adalah saksi perjuangan masyarakatnya melawan diskriminasi dan eksploitasi lingkungan. Menurut pengamatan peneliti, pemuda dan mahasiswa Mentawai di Padang adalah salah satu pemeran penting dalam membangun kontra-hegemoni, suatu langkah menentang diskriminasi dari dominasi kekuasaan yang mengancam identitas serta keberlanjutan lingkungan kampung halaman mereka. Menurut perspektif ilmu komunikasi, perjuangan tersebut tidak terlepas dari upaya membangun representasi rakyat Mentawai melalui komunikasi advokasi, khususnya di kalangan muda.

Berdasarkan interaksi dengan warga asal Mentawai, rakyat di kepulauan tersebut terdiskriminasi oleh sistem yang mempersempit ruang hidup mereka. Wilayah Kepulauan Mentawai, terutama Pulau Siberut adalah sasaran eksploitasi alam. Kayu-kayu dari hutannya diambil untuk kepentingan industri serta deforestasi terjadi demi membuka perkebunan. Di satu sisi Pulau Siberut juga merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Siberut, sedangkan orang-orang lokal dibatasi untuk memanfaatkan hasil alam di kawasan konservasi. Orang Mentawai bahkan pernah dicap sebagai peladang nomaden yang merusak lingkungan, seperti dijelaskan dalam buku *Berebut Hutan Siberut* (Darmanto, & Setyowati, 2012).

Dengan begitu, pemerintah menampilkan dua kesan di Kepulauan

Mentawai: di satu sisi mendukung eksploitasi sumber daya alam yang masif namun di sisi lainnya seolah-olah menjaga lingkungan dengan keberadaan Taman Nasional. Sedangkan ruang hidup masyarakat adat untuk memanfaatkan hasil alam sesuai kebutuhan semakin terbatas dengan keberadaan berbagai regulasi. Sementara para turis tetap dapat menikmati kecantikan pulau-pulau ini beserta ombak samudernya.

Selain persoalan lingkungan dan ruang hidup, orang-orang Mentawai juga masih menghadapi stigma, diskriminasi, dan persepsi buruk yang berkaitan dengan asal-usul etnis mereka. Salah satu stigma antara lain anggapan bahwa orang-orang Mentawai masih tertinggal dalam peradaban karena masih primitif. Pandangan itu memicu tindakan diskriminatif terhadap orang-orang asal Mentawai, antara lain penolakan ketika mencari tempat tinggal hingga tuduhan bahwa perempuan Mentawai bersifat “murahan”. Persoalan ini dibahas dalam situs Garak.id pada artikel “Di Tengah Badai Diskriminasi: Kisah Anak-anak Muda Mentawai di Padang” (Reimena, 2021).

Artikel tersebut juga menjelaskan, persoalan perbedaan agama pernah menjadi sebab diskriminasi terhadap warga Mentawai. Beberapa kali warga asal Mentawai di Padang terutama kalangan anak-anak muda mendapati kesulitan mencari tempat tinggal dan pekerjaan karena perbedaan agama. Dalam skripsi ilmu sejarah Unand berjudul *Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Awal Pemekaran hingga Era Pemerintahan Bupati Edison Saleleubaja Tahun 1999-2011* (Tatubeket, 2022), terdapat juga diskriminasi terhadap kepercayaan lokal Mentawai, Arat Sabulungan yang sempat dilarang pemerintah pada tahun 1954 hingga masa orde baru. Bahkan beberapa atribut kebudayaan yang menunjukkan

nilai kepercayaan Arat Sabulungan pun dihancurkan, seperti barang-barang ritual dan peralatan-peralatan sikerei.

Sementara sikerei adalah suatu peran penting dalam kebudayaan, adat, dan kepercayaan lokal Mentawai. Secara etimologis sikerei berarti orang yang menguasai mantra, yang dalam bahasa Mentawai disebut *kerei* (Tatubeket, 2022). Mereka juga memiliki kemampuan dalam pengobatan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari hutan. Dengan demikian Sikerei turut berperan menjaga harmoni antara alam dan manusia karena nilai kepercayaan Arat Sabulungan sangat memuliakan hutan.

Informasi-informasi di atas juga peneliti dapatkan dari interaksi dengan kawan-kawan asal Mentawai sejak 2021 lalu, melalui pergaulan dan pekerjaan peneliti sebagai jurnalis. Diskriminasi terhadap kepercayaan Arat Sabulungan juga dijelaskan dalam liputan berjudul “Kisah Penghancuran Kepercayaan Asli Mentawai” oleh Febrianti yang termuat dalam buku kompilasi liputan *Keragaman: Merawat Bangsa Lebih Beradab* (Febrianti, 2017) yang dikurasi oleh Alansi Jurnalis Independen (AJI). Sementara dalam tulisan akademik ini, peneliti akan fokus menelusuri upaya membentuk representasi pada orang-orang Mentawai terutama kalangan pemuda dan mahasiswa di Kota Padang.

Kendati peneliti telah membahas beberapa contoh bentuk diskriminasi terhadap orang Mentawai, peneliti memahami bahwa stigma dan diskriminasi tidak hanya dihadapi oleh orang-orang Mentawai. Peneliti juga tidak bermaksud untuk meningkatkan konflik antara orang-orang Mentawai dengan anggota kelompok etnis lainnya. Perlu dicatat, tidak seluruh warga Padang dan Sumatera Barat yang berperilaku diskriminatif terhadap orang-orang Mentawai.

Alih-alih membahas konflik antara suatu etnis dengan anggota etnis lainnya, peneliti justru hendak mempelajari gerakan resistensi atau perlawanan atas diskriminasi. Persoalan konkrit di Mentawai seperti deforestasi dan penyempitan ruang hidup adalah dampak dari kebijakan dan perizinan yang lebih memihak kepada para pemodal besar dibandingkan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian alam. Kapitalisme juga menjadi latar belakang pola pikir konsumerisme, sehingga kehidupan masyarakat berdampingan dengan hutan dianggap sebagai “primitif” dan “tertinggal” karena kurang menunjukkan modernitas.

Oleh karena itu, peneliti berpedoman pada paradigma kritis sebagai kerangka berpikir yang tepat untuk membahas masyarakat dan alam yang terdampak kapitalisme. Paradigma ini juga relevan untuk mempelajari gerakan sosial dengan sudut pandang ilmu komunikasi, khususnya irisan keilmuan sosiologi komunikasi. Pembahasan sosiologi komunikasi antara lain mencakup bagaimana kegiatan komunikasi mengarah kepada pembentukan dukungan, kesepakatan, hingga bisa berdampak pada jalannya kekuasaan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian penulis akan menggunakan teori dari seorang intelektual kritis sebagai landasan, yakni Antonio Gramsci (1891-1937). Seperti banyak pemikiran yang terpengaruh analisis Karl Marx atas kapitalisme, Gramsci juga memusatkan pemikirannya pada perjuangan kelas proletar atau kelas pekerja menghadapi sistem yang merugikan mereka. Menurut Marx dan para pemikir yang terpengaruh, kapitalisme adalah sistem zalim yang memunculkan pertentangan dan kontradiksi, sehingga memicu perlawanan (Eagleton, 2020).

Mereka memprediksi penindasan dalam kapitalisme menimbulkan reaksi pemberontakan dari rakyat hingga berujung pada revolusi. Dengan skema tersebut sistem kapitalisme bisa hancur. Namun, Gramsci mengkritik gagasan ini karena seolah mengabaikan faktor manusia sebagai pelaku dalam revolusi. Oleh karena itu Gramsci memusatkan perhatian pada pembentukan kesadaran manusia dalam pergerakan sosial, sehingga ia membahas konsep “hegemoni” (Simon, 2024).

Hegemoni menurut Gramsci adalah penguasaan berdasarkan konsensus atau persetujuan. Contohnya pada negara atau para elit penguasa yang berhasil menguasai pemikiran rakyat untuk mendukung mereka. Untuk mempertahankannya, hegemoni kadang dilindungi oleh kekuatan yang berpotensi melakukan kekerasan. Sebagai contoh, hegemoni negara atas rakyat diperoleh melalui instrumen informasi publik, propaganda, sekolah, dan lain-lain. Sementara aparat bersenjata bertugas melindungi upaya-upaya hegemoni tersebut dari gangguan (Simon, 2024).

Menggunakan analisis Gramscian untuk konteks Sumatera Barat, terdapat indikasi kekuasaan rezim pemerintahan memuat kepentingan oligarki-kapitalis. Eksploitasi hutan untuk bisnis dengan izin negara selama puluhan tahun di Mentawai adalah buktinya. Negara juga memiliki aparat bersenjata yang bisa melakukan kekerasan terhadap lawan-lawannya. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan upaya rezim penguasa-pemerintah dalam meraih konsensus rakyat sebagai suatu proses menuju hegemoni dominan.

Namun tidak menutup kemungkinan terdapat perlawanan dari pihak-pihak yang resisten. Mereka yang menolak konsensus terhadap hegemoni dominan bisa

menciptakan hegemoni tandingan atau hegemoni alternatif. Para pemikir Gramscian sering menyebutnya sebagai *counter-hegemony*, dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut “kontra-hegemoni”.

Menurut Stuart Hall (Barker, 2004), pembentukan representasi adalah unsur penting dalam upaya melawan hegemoni dominan. Hall menjelaskan representasi sebagai proses produksi makna dari konsep-konsep mental yang dibentuk di dalam pikiran kita melalui bahasa. Ini bukan sekadar merefleksikan realitas yang sudah ada, melainkan aktif membentuk dan menafsirkan realitas itu sendiri, sehingga realitas menjadi bermakna bagi kita. Dalam penelitian ini, pihak yang terlibat pembentukan representasi sebagai kontra-hegemoni antara lain rakyat yang menentang eksploitasi hutan serta diskriminasi terhadap Mentawai. Salah satu kelompok yang terlibat antara lain pemuda-mahasiswa asal Mentawai yang berkegiatan di Kota Padang.

Kelompok mahasiswa ini secara efektif menggunakan komunikasi advokasi untuk merebut kembali narasi. Sesuai dengan Teori Komunikasi Advokasi (ACT) dari Monica Cornejo (2024), gerakan mereka tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan sebuah proyek komunikasi yang multilevel dan multidimensi. Ini berarti mereka beroperasi di berbagai tingkatan, dari yang paling personal hingga yang paling politis, untuk menantang penindasan.

Pemuda Mentawai menerapkan berbagai strategi komunikasi yang melampaui metode tradisional. Mereka menggabungkan pesan eksplisit dan implisit, serta metode tradisional dan non-tradisional, untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam aktivitasnya, mahasiswa Mentawai juga beraliansi dengan gerakan

anak muda, kelompok masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pegiat kesenian dan kebudayaan, akademisi, hingga jurnalis. Upaya mereka dalam meraup simpati publik melalui kegiatan unjuk rasa, diskusi, hingga upaya negosiasi dengan wakil pemerintahan menunjukkan suatu ciri gerakan sosial yang Gramsci sebut sebagai *war of position* atau perang posisi (Simon, 2024).

Sebagai informasi, gerakan sosial di Nusantara sudah menjadi kajian peneliti-peneliti terdahulu, salah satu penelitian relevan berjudul “Gerakan Kontra-Hegemoni Masyarakat Adat Mollo Kepada Negara Dalam Pemberitaan Project Multatuli” dalam *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora* (Velrahga, K. D., Achmad, A., Sungkono, 2021). Penelitian tersebut menunjukkan ciri-ciri gerakan kontra-hegemoni pada masyarakat adat Mollo dalam menghadapi otoritas penguasa yang memaksakan modernisasi. Gerakan tersebut melibatkan komunikasi politik dan komunikasi massa.

Dalam konteks Sumatera, gerakan masyarakat Rempang di Kepulauan Riau juga menjadi kajian akademisi pada artikel “Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx” dalam *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (Valentine, E., Muhamad, M. N., Hakim, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan konflik di Rempang adalah wujud nyata pertentangan kelas antara kepentingan pembangunan oleh rezim pemerintah dengan rakyat setempat, seperti sering dibahas dalam paradigma kritis. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan adat sangat penting dalam mencari solusi penyelesaian konflik.

Sejalan dengan dua penelitian tersebut, peneliti memandang gerakan sosial selalu menjadi kajian penting dalam ilmu sosial dan humaniora. Selain

membawa konteks lokal Mentawai dan Sumatera Barat, peneliti berharap penelitian ini membawa kebaruan dalam pembahasan gerakan sosial di kalangan mahasiswa yang melibatkan nilai-nilai kebudayaan lokal Mentawai. Nilai itu antara lain terkandung dalam kesenian, salah satu bentuk seni yang populer yakni tato tradisional Mentawai.

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat dua isu menarik yang menjadi pemicu gerakan mahasiswa Mentawai beserta aliansinya dalam menunjukkan resistensi terhadap *status quo*. Pertama yaitu penolakan terhadap kegiatan Koperasi Minyak Atsiri Mentawai di Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kepulauan Mentawai karena dinilai merusak hutan. Peneliti pernah menulis berita-berita mengenai isu tersebut untuk media Harian Haluan *online*.

Berita-berita tersebut antara lain berjudul “Forum Mahasiswa Mentawai Klaim Aktivitas Koperasi Minyak Atsiri Memecah Kerukunan Masyarakat Desa Silabu” dan “Koperasi Minyak Atsiri Dapat Penolakan Masyarakat Desa Silabu Mentawai” pada 2 Desember 2021, “Tolak Hutan Diubah Jadi Kebun Koperasi, Koalisi Penyelamat Hutan Mentawai Geruduk Dishut Sumbar” pada 22 Desember 2021, “Eksplorasi Alam Dinilai Sudah Kelewatan, Kebudayaan Mentawai Makin Terancam, Potensi Banjir Meningkat” pada 23 Desember 2021.

Persoalan ini berlanjut pada tahun 2022, seperti terdapat pada berita yang peneliti tulis dengan judul “Koalisi Penyelamatan Hutan Mentawai Datangi Komnas HAM Sumbar Terkait Persoalan Koperasi Minyak Atsiri” pada 7 Januari 2022, “Penolakan Eksploitasi Hutan Untuk Koperasi Minyak Atsiri Di Mentawai Kembali Berlanjut” pada 3 Februari 2022, dan “Gelar Aksi di Dishut Sumbar, Koalisi penyelamat Hutan Masa Depan Mentawai Minta 4 Izin PKNK

Dicabut” pada 15 Februari 2022 (semua berita tersebut dapat diakses di padang.harianhaluan.com).

Kedua, penolakan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dinilai diskriminatif karena memuat nilai adat Minangkabau tanpa menyandingkannya dengan narasi tentang budaya Mentawai. Isu ini antara lain termuat dalam liputan BBC Indonesia pada 15 September 2022 dengan judul “Undang-Undang baru Sumatera Barat dan tuduhan diskriminasi 'yang menyakitkan' terhadap suku Mentawai”. Dalam hal ini, peneliti menemukan relevansi dengan salah satu skripsi Ilmu Politik Unand dengan judul *Formulasi Kebijakan dan Dinamikanya di Indonesia: Studi Kasus Penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat* (Fachira, 2024) yang membahas penolakan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2022 oleh Aliansi Mentawai Bersatu.

Sementara dalam penelitian ini, penolakan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2022 adalah salah satu bagian dari langkah-langkah kontra-hegemoni terhadap diskriminasi yang lebih luas dan mendasar. Dengan demikian, peneliti berharap memunculkan pembahasan yang lebih konkrit terkait dinamika rakyat Mentawai. Dengan berlandaskan pada ilmu komunikasi, penelitian ini turut memberi ruang pembahasan bagi persoalan politik dan kebudayaan, sehingga semakin membuktikan peran nyata serta fleksibilitas ilmu komunikasi untuk memahami kehidupan manusia.

Proses observasi untuk penelitian ini mencakup pengalaman peneliti sebagai jurnalis yang telah terlibat meliput kegiatan masyarakat Mentawai di Kota Padang sejak tahun 2021, bermula dari berita di media *Harian Haluan online*

dengan judul “Tampil di Pekan Kebudayaan Daerah, Seniman Mentawai Berharap Lebih Banyak wadah Bagi Budaya Mentawai” pada 5 Oktober 2021 (dapat diakses di padang.harianhaluan.com). Sehubungan dengan itu, peneliti juga bagian dari masyarakat sipil yang tertarik dengan perjuangan lingkungan dan masyarakat adat.

Sejak tahun tersebut hingga proposal penelitian ini disusun, peneliti telah berdiskusi dengan masyarakat Mentawai di Padang terutama pada kalangan anak muda, mahasiswa, hingga pegiat seni terutama pembuat tato tradisional Mentawai yang disebut sebagai sipati“ti. Liputan peneliti tentang seni tato Mentawai antara lain termuat pada media *online* Sumbarkita.id pada 16 Agustus 2022 dengan judul “Cara Anak Muda Mentawai Lestarkan Tato, Seni Rajah Tubuh Tertua di Dunia”.

Peneliti juga sudah mengunjungi Pulau Siberut di Mentawai bersama rekan- rekan organisasi Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman (Pelita Padang) pada 30 November hingga 2 Desember 2023. Peneliti menuliskan pengalaman tersebut di situs resmi PelitaPadang.org pada 5 Desember 2023 dengan judul artikel “Kunjungan Pelita ke Mentawai, Renungan Atas Harmoni Kehidupan Selaras dengan Alam”

Atas dasar itu, peneliti tertarik mempelajari dan membahas gerakan sosial pemuda Mentawai di Padang melawan diskriminasi. Peneliti mengusung judul: **Representasi Pemuda Mentawai di Padang Melawan Hegemoni Diskriminasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang peneliti rumuskan

adalah: “Bagaimana pemuda Mentawai di Padang melakukan komunikasi advokasi untuk membentuk representasi melawan hegemoni dominan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis akar, bentuk, dan wacana diskriminasi terhadap rakyat Mentawai.
2. Menganalisis komunikasi advokasi oleh pemuda Mentawai di Padang dalam membentuk representasi melawan hegemoni dominan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru pada paradigma kritis ilmu komunikasi dalam mengkaji gerakan sosial menggunakan pisau analisis hegemoni Gramscian, khususnya di Sumatera dan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk memahami hubungan antara penguasa pemerintahan dengan masyarakat sipil khususnya rakyat Mentawai di dalam kerangka ekonomi-politik yang kapitalistik, serta bagaimana respon yang muncul dari rakyat.

